

The Role of the Village Government in Management of Tourism Objects in Gunung Sari Village, Alok District, Sikka Regency

Irvan¹, Petrus Kpalet², Rodja Abdul Natsir³

Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan
Fakultas Ilmu Pendidikan Sosial dan Humaniora, IKIP Muhammadiyah Maumere, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to find out how the role of the village government in managing tourism objects in Gunung Sari Village, Alok District, Sikka Regency and what are the obstacles faced by the Gunung Sari Village Government in managing tourism potential. The research method used is a qualitative approach. The data sources in this study are primary data sources and secondary data sources. The selected informants in this study were the secretary of Gunung Sari Village, members of the BPD of Gunung Sari Village, members of Pokdarwis and community leaders of Gunung Sari Village. Data analysis techniques consist of data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. Based on the results of the study that the role of the village government in managing the tourism object of Gunung Sari Village, Alok District, Sikka Regency has carried out its role through activities carried out by the Ministry of Tourism and Culture of Gunu to improve human resources, residents of Gunung Sari Village that it is important to maintain a tourist attraction.

Keyword: **Role, village government, tourist attraction**

Corresponding Author:

Irvan,
Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan
Fakultas Ilmu Pendidikan Sosial dan Humaniora,
IKIP Muhammadiyah Maumere, Indonesia
Email: nongirvan39@gmail.com



1. PENDAHULUAN

Destinasi pariwisata di Indonesia seperti kekayaan alam dan budaya pontesi dalam menyumbangkan pengembangan sektor pariwisata. Keunikan serta daya Tarik wisata dan atraksi wisata daerah merupakan model utama dalam pembangunan maupun pengembangan sektor pariwisata di Indonesia. Sejarah pariwisata menunjukkan bahwa pariwisata berperan penting dalam membangun perekonomian Negara dan meningkatkan kesejahteraan penduduk. Pariwisata merupakan sistem ekonomi dengan aspek yang saling berkaitan dan melengkapi. Menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia memiliki jumlah pulau sebanyak 16.056 (BPS Indonesia, 2018). Jumlah pulau yang banyak memungkinkan terdapat pulau yang berpenghuni dan pulau tidak berpenghuni yang memiliki potensi pengembangan pariwisata.

Pulau yang berpenghuni akan memiliki keunikan kebudayaan tersendiri. Pemanfaatan terhadap keunikan budaya itu merupakan penyebab berdirinya, organisasi desa agar dapat mengoptimalkan beragam potensi yang dimiliki oleh desa setempat. Organisasi seperti BUMDes dan Desa Wisata akan menampilkan suasana pedesaan, keasrian alam dan kebudayaanya dengan segala bentuk keindahan yang dimiliki sehingga menawarkan kekhasan suasana pedesaan seperti destinasi dan spot yang bisa dikembangkan menjadi tempat-tempat yang menarik pengunjung, untuk berkunjung ke daerah tersebut. Pulau Pemana, salah satu pulau berpenghuni yang berada pada gugus kepulauan kawasan teluk Maumere, Kabupaten Sikka Nusa Tenggara Timur. Pulau itu terdapat dua desa. Salah satunya Desa Gunung Sari. Adapun Desa Gunung Sari secara

geografis terletak di kawasan pesisir sehingga desa ini memiliki potensi wisata pantai yang tentunya dapat dikelola oleh masyarakat.

Terdapat dua destinasi wisata yang menjadi kebanggaan masyarakatnya yaitu wisata sawengka beach dan wisata pantai kaurangka. Destinasi wisata sawengka beach merupakan destinasi wisata dengan mengunggulkan kecantikan pantai yang melengkung dengan panjang pantai sekitar 2.3 km dan pasir putih serta air laut yang jernih, disekitaran pantai dipenuhi pepohonan kelapa yang menjadi incaran serta tempat para pengunjung berteduh dan menikmati buahnya. Destinasi wisata sawengka beach terletak di bagian utara desa Gunung Sari dengan jarak antara lokasi dan pemukiman warga sejauh 1 km. Banyak cara yang bisa digunakan sebagai akses menuju lokasi wisata, yaitu dengan berjalan kaki atau menggunakan kendaraan roda dua.

Destinasi wisata kaurangka tidak jauh berbeda dengan destinasi wisata sawengka beach, yaitu sama-sama mengandalkan pesona pantai, pasir putih, dan air laut yang jernih. Namun pada destinasi wisata kaurangka tidak dikelola oleh pemerintah karena tanah yang dimiliki merupakan tanah masyarakat desa gunung sari yang dijual kepada orang luar. Destinasi wisata kaurangka sudah dipenuhi dengan bangunan yang menarik, seperti *resort* sebagai tempat orang luar berkunjung dan menginap. Kebanyakan pengunjung yang datang ke tempat wisata berasal dari luar negeri. Lokasinya cukup jauh dari pemukiman warga, serta akses menuju tempat wisata cukup susah yaitu harus menggunakan kapal laut yang berukuran kecil. Kedatangan wisatawan mancanegara ke desa Gunung Sari merupakan bentuk dukungan yang diberikan oleh masyarakat dan pemerintahan desa terhadap wisata yang ada di desa Gunung Sari. Meski demikian, jumlah wisatawan yang datang pun masih tergolong rendah, hal ini karena belum adanya manajemen dan tata kelola yang baik dari pemerintah. Peran pemerintah desa tentu menjadi ujung tombak dalam pengelolaan objek wisata yang ada di desa ini

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, yaitu peneliti merupakan instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Kuswana, 2011).

Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung maknas, yaitu data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak. Oleh karena itu, penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna sehingga memerlukan sebuah data lapangan yang bersifat aktual dan konseptual. Disamping itu, metode pendekatan kualitatif lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh terhadap teori-teori di lapangan.

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2017)

3. PEMBAHASAN

1. Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Objek Wisata Desa Gunung Sari

Peran menurut Soekanto (2009:212-213) adalah proses dinamis kedudukan (status), artinya suatu peran itu dilaksanakan berdasarkan status yang melekat pada orang atau kelompok. Lebih lanjut menurut Talcott Parson, untuk menjalankan suatu peran maka perlu melaksanakan setiap fungsi di dalamnya. Tanpa melaksanakan fungsi maka peran itu tidak dapat dijalankan dengan baik. Sebab peran itu sesungguhnya merupakan suatu kesatuan atas fungsi-fungsi di dalamnya. Peran pemerintah dalam pemberdayaan potensi aset desa dipandang sebagai salah satu upaya memperbaiki kinerja organisasi serta memperbaiki pelayanan lembaga terhadap masyarakat. Semua aktivitas tersebut merupakan elemen operatif dalam upaya mencapai tujuan organisasi secara optimal. Berbicara mengenai peran pemerintah maka tentunya yang dilihat di sini adalah fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh pemerintah desa guna menjalankan peran sebagai pemerintah. Adapun fungsi yang dilaksanakan itu meliputi:

a. Fungsi pemerintah desa sebagai regulator

Menurut Pasal 18 Undang-Undang No. Tahun 2014 Tentang Desa, Kewenangan desa meliputi bidang penyelenggaraan pemerintah desa. Pelaksanaan pembangunan desa pembinaan kemasayarakat desa dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu kewenangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berupa menyiapkan suatu regulasi sebagai dasar dalam tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan

kebutuhan masyarakat desa dan juga menyiapkan suatu kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Sehubungan dengan fungsi ini sebagaimana yang terdapat pada temuan penelitian, fungsi ini dilaksanakan Pemerintah Desa gunung Sari berupa merevisi terkait alokasi anggaran untuk pengelolaan objek wisata yang semula hanya sebesar 5% menjadi 10% hingga 20% yang bersumber dari APBDes. Selain itu, Pemerintah desa pun mengeluarkan kebijakan pelaksanaan bersih-bersih di hari Jum'at dan sabtu di lokasi wisata dan mewajibkan seluruh warga untuk berpartisipasi. Hal ini tentu menjadi suatu bentuk komitmen pemerintah desa untuk mengelola objek wisata. Sehubungan dengan adanya revisi Perdes hingga pada terbitnya kebijakan bersih-bersih merupakan wujud nyata bagaimana fungsi regulator benar-benar dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Gunung Sari.

b. Fungsi pemerintah desa sebagai dinamisator

Merujuk pada UU No. 6 Tahun 2014 Tentang desa Pasal 79 ayat (1) dan (2) juga disebutkan bahwa pemerintah desa menyusun dan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Artinya, dalam menjalankan perannya maka setiap regulasi dan kebijakan yang ada harus bersinergi dengan perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Sehingga dengan kata lain, ini berkaitan dengan peran pemerintah desa dalam menjalankan fungsi sebagai dinamisator. Peran pemerintah dalam menjalankan fungsi dinamisator merupakan upaya menggerakkan partisipasi multipihak tatkala stagnasi terjadi dalam proses pembangunan (mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah). Sebagai dinamisator, pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat. Bimbingan dan pengarahan sangat diperlukan dalam memelihara dinamika. Selain itu, pemerintah desa tiada hentinya berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan melalui kebijakan bersih-bersih yang mewajibkan masyarakat untuk berpartisipasi. Sehingga dalam pengelolaan objek wisata ini tidak hanya bertumpu pada tanggung jawab pemerintah desa sendiri melainkan juga melibatkan berbagai pihak. Hal ini tentu memberikan gambaran bahwa fungsi dinamisator benar-benar dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Desa Gunung Sari.

c. Fungsi sebagai fasilitator

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berkenaan dengan hal ini maka dengan adanya kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa sehingga secara tidak langsung terdapat kewajiban yang diemban oleh pemerintah desa untuk mewujudkan kebutuhan dan harapan masyarakat desa. Pemerintah desa harus mampu memfasilitasi semua kebutuhan dan harapan itu melalui kebijakan-kebijakan pembangunan desa. Salah satunya adalah dalam mengelola potensi wisata menjadi suatu peluang yang baik bagi kehidupan masyarakat desa. Sehubungan dengan hal ini maka dapat dikatakan bahwa upaya yang dilakukan tersebut adalah suatu gambaran di mana pemerintah desa melaksanakan peran melalui fungsinya sebagai fasilitator. Adapun Peran pemerintah dalam menjalankan fungsi fasilitator yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjembatani kepentingan berbagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah). Sebagai fasilitator, pemerintah berusaha menciptakan atau memfasilitasi suasana yang tertib, nyaman dan aman, termasuk memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pembangunan.

Berdasarkan hasil penelitian, di tengah situasi ekonomi masyarakat desa yang semakin terpuruk dan ditambah lagi pandemi Covid 19 yang melanda dunia sehingga menjadi tuntutan tersendiri bagi pemerintah desa untuk mencari jalan keluar. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Gunung Sari berupa menjadikan potensi alam di Pantai Sawangka dan Kaurangka sebagai peluang untuk menjadi destinasi wisata. kondisi sosial masyarakat di Desa Gunung Sari secara perlahan diubah untuk menjadi desa wisata. Upaya yang dilakukan ini pun bukan tanpa hambatan, berbagai dinamika pun dihadapi. Mulai dari persoalan minimnya SDM hingga pada masalah kepemilikan lahan menjadi suatu tantangan tersendiri untuk diselesaikan tanpa menimbulkan kegaduhan. Berbagai upaya menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah di kabupaten termasuk berkaitan dengan mengadakan pelatihan, kemudian penyelesaian masalah kepemilikan lahan secara persuasif. Di samping itu, sebagai komitmen dalam mengelola objek wisata, pemerintah desa pun berupaya untuk melakukan renovasi fasilitas pendukung yang telah usang hingga pada upaya pengadaan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya.

2. Hambatan Yang Dihadapi Pemerintah Desa Gunung Sari Dalam Mengelola Potensi Wisata

Setiap pembangunan tentu tidak akan luput dari suatu hambatan. Hal ini juga dihadapi oleh Pemerintah Desa Gunung Sari dalam mengelola objek wisata di desa itu. Berdasarkan temuan penelitian,

ditemukan adanya hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Gunung Sari dalam mengelola objek wisata di desa itu.

Keberhasilan pengelolaan objek wisata tentu tidak sekedar menekankan pada hasil, tetapi juga pada prosesnya melalui tingkat partisipasi yang tinggi, yang berbasis kepada kebutuhan dan potensi masyarakat setempat. Untuk meraih keberhasilan itu, pemerintah perlu melakukan pendekatan bottom-up, dengan cara menggali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat. Potensi atau kebutuhan tersebut tentu saja sangat beragam walaupun dalam satu komunitas yang sama.

Dalam hal ini Pemerintah Desa Gunung Sari dapat menentukan skala prioritas yang dipandang sangat perlu untuk dikembangkan. Kondisi seperti inilah yang menjadi acuan untuk menentukan perencanaan pengelolaan yang tepat (tujuan, materi, metode, alat, evaluasi) yang dirumuskan bersama-sama dengan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam tahapan perencanaan ini, merupakan salah satu cara untuk mengajak mereka aktif terlibat dalam proses pengelolaan. Dengan keterlibatan tersebut, mereka memiliki ikatan emosional untuk menyukseskan pengelolaan objek wisata. Sehingga hambatan yang dihadapi dapat diselesaikan dengan baik.

4. KESIMPULAN

Setelah peneliti mengadakan penelitian di Desa Gunung Sari, Kec Alok, Kabupaten Sikka mengenai Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Objek Wisata Desa Gunung Sari dapat ditarik kesimpulan sehubungan dengan peran pemerintah desa dalam mengelola objek wisata di Desa Gunung Sari. Fungsi Regulator, Sehubungan dengan fungsi ini sebagaimana yang terdapat pada temuan penelitian, fungsi ini dilaksanakan Pemerintah Desa gunung Sari berupa merevisi terkait alokasi anggaran untuk pengelolaan objek wisata yang semula hanya sebesar 5% menjadi 10% hingga 20% yang bersumber dari APBDes. Selain itu Pemerintah desa mengeluarkan kebijakan bersih-bersih setiap hari jum'at dan sabtu dengan mewajibkan partisipasi warga. Fungsi Dinamisator, Berkenaan dengan fungsi ini, sebagaimana pada temuan penelitian bahwa komitmen pemerintah desa dalam mengelola objek wisata dengan menjalin kerja sama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan juga bekerja sama dengan beberapa komunitas menggelar pelatihan dan pengembangan bakat pada sektor wisata. Hal ini sebagai wujud untuk mempersiapkan masyarakat untuk menjadikan Desa Gunung Sari sebagai desa wisata dan mampu menerima kehadiran para wisatawan yang datang. Selain itu, pemerintah desa tiada hentinya berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan melalui kebijakan bersih-bersih yang mewajibkan masyarakat untuk berpartisipasi. Hal ini tentu memberikan gambaran bahwa fungsi dinamisator benar-benar dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Desa Gunung Sari. Fungsi Fasilitator, Berdasarkan hasil penelitian maka Peran pemerintah desa sebagai fasilitator adalah dengan melakukan pelaksanaan pembangunan untuk mengembangkan objek wisata terkhususnya pantai sawangka dan pantai kaurangka. Sebagai fasilitator juga, pemerintah bergerak dibidang pendampingan melalui pelatihan-pelatihan, yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Sikka mengenai pengeolaan, mengembangkan dan peningkatan keterampilan bagi kelompok masyarakat Pokdarwis, serta di bidang pendanaan atau pemodaln pemberian bantuan modal kepada masyarakat untuk mengelola objek wisata menjadi lebih menarik. Sehubungan dengan hambatan yang dihadapi pemerintah desa gunung sari dalam mengelola potensi wisata.

Keterbatasan anggaran, Salah satu hal penting dalam setiap pembangunan adalah ketersediaan anggaran. Semakin banyak anggaran yang tersedia maka semakin lancar pula progres pembangunan yang dikerjakan. Akan menjadi suatu masalah apabila dalam perkembangan suatu pembangunan bila terjadi keterbatasan ketersediaan anggaran. Hal ini pun dialami oleh Pemerintah Desa Gunung Sari dalam mengelola objek wisata pantai Sawangka dan Kaurangka. Status kepemilikan lahan menjadi masalah lain yang dihadapi oleh Pemerintah Desa gunung Sari. Adapun sebagian lahan yang dikelola oleh Pemerintah Desa merupakan milik perorangan sehingga dalam pengelolaannya sering terjadi perbedaan pendapat dengan pemilik lahan. Akibatnya, pengelolaan objek wisata ini menjadi tidak maksimal. Minimnya Kesadaran Masyarakat. Berdasarkan observasi, ditemukan masih banyak sampah yang berserakan di lokasi pantai yang dijadikan objek wisata baik itu di pantai Sawangka maupun pantai Kaurangka. Selain itu masih terlihat beberapa hewan ternak yang berkeliaran. Hal ini menunjukkan bahwa belum sepenuhnya masyarakat siap untuk menyediakan destinasi wisata karena minimnya kesadaran masyarakat.

Adapun saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini. Bagi Pemerintah, dalam rangka pengelolaan objek wisata, perlu dibuatkan suatu perangkat hukum berupa perdes yang secara khusus mengatur tentang tata kelola objek wisata di desa tersebut. Bagi Masyarakat, pengelolaan objek wisata bukan hanya semata-mata tugas pemerintah desa, butuh adanya partisipasi dari masyarakat sehingga manfaat pengelolaan objek wisata dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat

REFERENCES

- Adisasmita, Raharjo. 2010. *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Bastian, Indra. 2015. *Akuntansi Untuk Kecamatan dan Desa*. Erlangga. Jakarta
- Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Ar-Ruzz Media. Yogyakarta
- Hanief, Shofwan dan Dian Pramana. 2018. *Pengembangan Bisnis Pariwisata dengan Media Sistem Informasi*. Yogyakarta
- Iskandar, Jusman. 2015. *Manajemen Publik*. Cet ke-16. Puspaga. Bandung
- Komarudin. 1994. *Ensiklopedia Manajemen*. Bumi Aksara. Jakarta
- Marpaung, H dan Bahar. Herman. 2002. *Pengantar Pariwisata*. Alfabeta. Bandung
- Moleong, Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Nurcholis, H. 2005. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Grasindo. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa <https://www.bpkp.go.id>
- Riduwan. 2006. *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula*. Alfabeta. Bandung
- Ridwan, Mohamad. 2012. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. PT Sofmedia. Bandung
- Rivai, Veihzal. 2004. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Yogyakarta
- Salam, Dharma Setyawan. 2007. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Djambatan. Jakarta
- Sammeng, Andi M. 2001. *Cakrawala Pariwisata*, Balai Pustaka, Jakarta
- Siagian, Sondang P. 2012. *Administrasi Pembangunan. Konsep, dimensi dan Strateginya*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Slamet, Margono. 1985. *Pengantar Sosiologi*. Rajawali. Jakarta
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan <https://www.kemendparekraf.go.id/index.php/categories/undang-undang>